

*Conceptual Article*

**Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama**

M. Riyanto<sup>1\*</sup>, Vitalina Kovalenko<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

<sup>2</sup>Geneva Graduate Institute

\*mrr.riyanto@gmail.com

**ABSTRACT**

The welfare state is a concept that shows the government's responsibility to provide social protection to all its citizens. It needs active participation from the community to achieve it. This article aims to discuss the importance of active community participation in creating a welfare state, along with the challenges and obstacles. The active participation of the community plays an important role in realizing a welfare state. Community participation can increase the effectiveness and efficiency of social programs proclaimed by the government, as well as help the community understand their roles and responsibilities in realizing shared prosperity. There are several obstacles in the implementation of community participation, such as the lack of public understanding of the importance of participation, differences in views and interests, as well as limited resources and support from the government. The government needs to strengthen coordination and collaboration with the community in planning and implementing welfare programs and ensuring transparency and accountability in managing public resources and building an effective oversight system.

**Keywords: Welfare State; Sosial Programs; Community Participation.**

**ABSTRAK**

Negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapainya. Artikel ini bertujuan membahas pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan, beserta tantangan dan hambatannya. Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya maupun dukungan dari pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan membangun sistem pengawasan yang efektif.

**Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Program Sosial; Partisipasi Masyarakat.**

## A. PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan adalah suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Sistem ini meliputi berbagai macam kebijakan publik dan layanan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan keamanan social (Elviandri, Dimiyati, & Absori, 2019). Negara kesejahteraan juga berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat yang lebih kaya dan miskin melalui redistribusi pendapatan dan kebijakan fiskal yang adil (Suryono, 2018). Namun, implementasi konsep negara kesejahteraan seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal keuangan dan politik. Pemerintah perlu menemukan sumber daya yang cukup untuk membiayai program-program tersebut dan memastikan bahwa penerima manfaatnya benar-benar mendapatkan dukungan yang dibutuhkan masyarakat. Pengambilan keputusan politik dan kebijakan harus mengakomodasi berbagai kepentingan dan opini yang berbeda-beda, dan tetap mempertahankan visi jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan bersama (Fedryansyah, 2016).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi konsep negara kesejahteraan adalah adanya perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang berbeda dalam masyarakat, terutama dalam hal kesejahteraan dan redistribusi

pendapatan. Beberapa kelompok masyarakat menganggap bahwa program-program kesejahteraan ini seharusnya tidak ada, karena mereka percaya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah (Dahlan, & 'Irfaan 2014). Sementara itu, kelompok lain merasa bahwa program-program ini tidak cukup, dan lebih banyak dukungan dan sumber daya diperlukan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan kesejahteraan seringkali dianggap sebagai biaya yang tidak perlu oleh pihak yang lebih konservatif secara ekonomi, sehingga pemerintah perlu menjelaskan manfaat jangka panjang dari program-program kesejahteraan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan (Lismanto, & Utama 2020)

Terlepas dari pro dan kontra pandangan tentang konsep negara kesejahteraan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". negara perlu menjamin kesejahteraan sosial warga masyarakatnya (Hadiyono, 2020), sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro atas terwujudnya negara kesejahteraan memiliki nilai

urgensi yang sangat tinggi. Dalam Bahasa lain partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mendorong dan mendukung implementasi konsep negara kesejahteraan, sehingga kebijakan publik yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena konsep awal negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mana mempunyai makna bahwa pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga partisipasi masyarakat adalah yang utama dalam suatu negara demokrasi seperti negara Indonesia (Aswandi, & Roisah 2019).

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang penting dalam pembangunan negara kesejahteraan. Masyarakat yang aktif berpartisipasi dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan mereka, terutama mereka yang membutuhkan dukungan dari Negara (Anasiru, 2011). Partisipasi masyarakat juga membantu mempercepat dan memperluas akses publik terhadap sumber daya dan layanan kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di dalam masyarakat (Sukmana dkk, 2015).

Namun, partisipasi masyarakat bukanlah hal yang mudah dilakukan. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan negara kesejahteraan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi, kurangnya akses dan informasi, serta perbedaan kepentingan dan pandangan yang ada di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan membahas dan menekankan makna penting Tindakan yang diperlukan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara kesejahteraan dengan memperbaiki akses informasi dan layanan, memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi, serta meningkatkan dialog dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.

Penelitian dan/atau tulisan yang membahas mengenai kesejahteraan sosial dan peran aktif masyarakat, sejatinya telah dilakukan oleh beberapa penulis dan diterbitkan diberbagai jurnal baik level nasional maupun internasional. Dalam skala nasional penelitian atau tulisan yang membahas mengenai peran masyarakat dan kesejahteraan, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Suhendi dalam artikelnya berjudul Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, artikel ini mengkaji tentang penguatan pengetahuan pranata sosial dan peran tokoh masyarakat yang memiliki sumbangsih signifikan dalam proses pembangunan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Suhendi, 2013). Tulisan ini berbeda dengan apa yang dikaji oleh penulis yang lebih membahas mengenai

pentingnya penguatan atas partisipasi masyarakat secara umum, tidak terbatas pada permasalahan dalam lingkup tokoh masyarakat dan pranata sosial lainnya.

Selanjutnya tulisan yang dikemukakan oleh M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi, dengan judul *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial*, tulisan ini berupaya untuk menekankan makna penting pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial (Maspaitella, & Rahakbauwi 2014). Tulisan ini, memiliki persamaan dengan penulisan peneliti yaitu mengangkat tema tentang pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan sebagainya demi mencapai kesejahteraan sosial, namun demikian terdapat perbedaan yang diangkat, dimana tulisan dalam artikel penulis ini akan lebih memberikan pemahaman mengenai pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk mengasah pengetahuan atas pentingnya partisipasi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut terdapat tulisan yang dikaji oleh Ratih Probosiwi dengan judul *Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Tulisan ini lebih cenderung menekankan pemberdayaan yang tidak memandang gender dalam mencapai kesejahteraan sosial (Probosiwi, 2015). Senada dengan Ratih Probosiwi, Dorothy C. Miller dalam tulisannya berjudul *Women and Sosial Welfare: A Feminist Analysis*, juga menekankan pentingnya

peran perempuan dan kemudian menganalisis isu feminis dalam membagi dan memenuhi kebutuhan sosial (Miller, 1991). Kedua tulisan ini sangat berbeda dengan tulisan penulis, walau sama-sama membahas peran masyarakat dalam mencapai kesejahteraan sosial, namun penelitian penulis tidak menyinggung gender dan lebih menekankan makna penting pemahaman dan peran aktif warga atas kesejahteraan sosial.

Terakhir adalah tulisan yang dibuat oleh Sarbeswar Sahoo, dengan judul *Globalization, social welfare and civil society in India*, tulisan ini mengkaji mengenai praktik aktivisme masyarakat di era modern yang lebih pro aktif atas permasalahan isu kesejahteraan masyarakat (Sahoo, 2008). Penelitian ini memiliki persamaan dengan artikel penulis yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sudah menjadi kebutuhan global, namun perbedaannya adalah bahwa artikel penulis mencoba memotret makna penting dan hambatan serta tantangan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial, dengan demikian bisa dikemukakan bahwa artikel ini memiliki nilai kebaruan (*Novelty*) dan penting untuk diulas.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Partisipasi**

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai upaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang

mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti memberikan masukan, memberikan tanggapan, menyumbangkan tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta turut serta dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan (Czapanskiy, & Manjoo 2008). Tujuan dari partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan publik dan pembangunan, sehingga dapat lebih merespons kebutuhan dan harapan masyarakat, serta mendorong terciptanya negara yang lebih demokratis dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat (Harris, Owen, & Gould 2012).

Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting di tengah kompleksitas isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara saat ini. Dengan partisipasi masyarakat yang aktif, kebijakan publik dapat lebih terbuka, akuntabel, dan partisipatif, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan kohesi masyarakat, serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama (Masango, 2002).

Landasan teoritis partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam beberapa pendekatan teori seperti teori demokrasi partisipatif, teori kekuasaan, teori keterlibatan masyarakat, dan

teori aksi kolektif. Teori demokrasi partisipatif oleh Herbert Mc Closky yang menekankan pada pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga masyarakat dianggap memiliki peran aktif dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, teori kekuasaan oleh John Locke menekankan pada cara bagaimana masyarakat memperjuangkan kepentingan mereka dalam suatu sistem kekuasaan yang kompleks (Feenstra, 2015).

Di sisi lain, teori keterlibatan masyarakat oleh Keith Davis menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat mencakup berbagai metode yang digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk partisipasi dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program publik. Sedangkan teori aksi kolektif oleh Maximilian Weber yang menyoroti pentingnya kerja sama antara masyarakat dalam meraih tujuan bersama. Dalam keseluruhan, landasan teoritis partisipasi masyarakat menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah penting dalam membangun tata kelola yang baik dan menjamin keberhasilan pembangunan negara kesejahteraan (Van Deth, 2001).

Konsep partisipasi dalam konteks penulisan artikel ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam bingkai negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state sendiri adalah sebuah sistem kebijakan sosial yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara mendapatkan jaminan dan

perlindungan sosial yang cukup dari negara (Yay, & Aksoy, 2018) Negara kesejahteraan ini didasarkan pada prinsip solidaritas sosial, di mana warga negara yang lebih mampu membantu mereka yang kurang mampu. Konsep negara kesejahteraan ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya (Hajjighasemi dkk, 2022).

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam konsep negara kesejahteraan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses di mana warga negara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program-program yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam konsep negara kesejahteraan karena dapat memperkuat solidaritas sosial di antara warga negara, memperbaiki kualitas program-program sosial yang diselenggarakan, serta meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan sosial. Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, program-program sosial dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan dapat memastikan bahwa jaminan sosial dan perlindungan yang diberikan oleh negara benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga

negara, terutama mereka yang kurang mampu (Asyhabuddin, 2022).

## **2. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan**

Partisipasi masyarakat merupakan suatu upaya yang penting dalam membangun negara kesejahteraan, terutama dalam program-program kesejahteraan sosial. Masyarakat yang aktif terlibat dalam program-program tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memastikan bahwa program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya, di Indonesia terdapat program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dirancang untuk membantu masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Program ini meliputi bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan kartu sembako bagi yang terdampak Covid-19 (Nasrah dkk, 2021). Partisipasi masyarakat dalam program semacam ini terlihat dari adanya mekanisme verifikasi data penerima bantuan yang melibatkan warga setempat, sehingga memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan atau program-program yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci penting dalam memastikan program-program kesejahteraan sosial benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat menjadi kunci penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan merata, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam sektor pendidikan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk.

Seperti contoh, di sektor kesehatan, partisipasi masyarakat sangat penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan penyuluhan kesehatan, pemberian dukungan sosial kepada pasien dan keluarga, hingga pengelolaan fasilitas kesehatan di wilayah masyarakat. Sebagai contoh, di India terdapat program "Accredited Social Health Activist (ASHA)" yang melibatkan para relawan masyarakat dalam memberikan penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di pedesaan (Rahul dkk, 2021).

Sementara itu, dalam sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam program pelatihan dan pengembangan keterampilan, mendirikan koperasi atau kelompok usaha bersama, hingga mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi di wilayah masyarakat (Sari, 2017). Contohnya, di Filipina terdapat program "Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P)" yang memberikan bantuan sosial dan pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin agar dapat mengembangkan usaha dan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dalam program-program ini, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Aguado, 2021).

Selanjutnya Masyarakat juga memainkan peran penting dalam mitigasi risiko sosial dan bencana alam. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program mitigasi risiko sosial dan bencana alam. Masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di daerah mereka dan memberikan informasi tentang cara-cara untuk mengurangi risiko tersebut. Contohnya adalah ketika terjadi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, masyarakat dapat membantu dalam proses evakuasi dan memberikan pertolongan pertama kepada korban. Selain itu, masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti tanggul atau bangunan yang kuat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam mitigasi risiko sosial dan bencana alam dapat membantu mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana dan mempercepat proses pemulihan (Widayanti, 2016).

### **3. Tantangan dalam Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin

keberhasilan dari program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala dan hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam program-program sosial (Ta'dung, & Lusdani, 2020). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti minimnya informasi yang diberikan, ketidakpercayaan terhadap program yang dijalankan, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Faktor lingkungan sosial, politik, dan ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam partisipasi masyarakat. Adanya ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat memengaruhi kemampuan dan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam program-program kesejahteraan sosial. Selain itu, politik yang tidak stabil dan kurangnya kebebasan berekspresi juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat (Nurbaiti, & Bambang, 2017). Sebagai contoh, dalam beberapa negara, masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah bisa mengalami tekanan atau bahkan ditangkap, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam program-program sosial.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor kunci dalam membangun sebuah negara yang demokratis dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam

kegiatan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program ini. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Misalnya, melalui kegiatan forum musyawarah desa atau kelurahan, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap program-program kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan cara-cara partisipasi yang efektif. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya partisipasi mereka dalam program-program kesejahteraan sosial dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi.

Lebih lanjut, pemerintah juga dapat memberikan insentif atau motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Misalnya, pemerintah memberikan bantuan keuangan atau penghargaan kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Dengan memberikan insentif atau motivasi, masyarakat akan lebih

termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam program-program kesejahteraan sosial.

Namun, upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap informasi mengenai program-program kesejahteraan sosial yang tersedia. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui program-program kesejahteraan sosial yang ada dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam program-program tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kampanye dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial yang tersedia dan cara partisipasi yang efektif.

Tantangan lain adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi dari sebagian masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang terpencil atau kurang berkembang. Beberapa masyarakat mungkin kurang percaya diri atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan dan bimbingan yang cukup kepada masyarakat, terutama mereka yang kurang terbiasa dengan partisipasi dalam program-program kesejahteraan sosial.

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Pemerintah sebagai lembaga negara yang memegang peran penting dalam mengatur

kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut. Melalui kolaborasi ini, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program-program yang dilaksanakan, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adalah dalam bidang pendidikan. Program pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, terutama dalam pengawasan dan pemantauan kualitas pendidikan di lingkungan mereka. Pemerintah dapat membuka kanal partisipasi masyarakat melalui forum-forum diskusi dan pertemuan dengan orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya. Dalam forum ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran mengenai perbaikan pendidikan di wilayah mereka, serta berperan aktif dalam memantau pelaksanaan program-program pendidikan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Melalui kolaborasi ini, program pendidikan pemerintah dapat menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, karena didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dalam semua tahap pelaksanaannya (Astawa, 2017).

Selain di bidang pendidikan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga dapat dilakukan dalam bidang kesehatan. Program-

program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat lebih efektif apabila masyarakat ikut serta dalam pelaksanaannya. Contohnya, program imunisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat melibatkan kader-kader kesehatan dari masyarakat setempat dalam pelaksanaannya. Kader-kader kesehatan ini dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya imunisasi, serta melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang belum menjalani imunisasi. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu dalam mencapai target program imunisasi yang telah ditetapkan, serta mencegah penyebaran penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan transparan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah terlibat dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial. Pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial di berbagai negara dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat komunitas dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa studi kasus tentang partisipasi masyarakat dalam program kesejahteraan sosial di beberapa negara:

- a. Program Food Banks di Kanada Salah satu contoh program kesejahteraan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah Food Banks di Kanada. Food Banks adalah program kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan di Kanada. Program ini dengan mengandalkan donasi makanan dari masyarakat dan perusahaan. Program ini telah berhasil mengurangi tingkat kelaparan. Partisipasi masyarakat dalam program ini sangat penting, karena donasi makanan yang diberikan oleh masyarakat dan perusahaan merupakan sumber utama keberhasilan program ini (BEKEN, 2021)
- b. Program Conditional Cash Transfer di Brasil Program Conditional Cash Transfer (CCT) di Brasil adalah program kesejahteraan sosial yang memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin dengan syarat mereka harus mengikuti program kesehatan dan pendidikan. Program ini menjadi salah satu program kesejahteraan sosial terbesar di dunia. Pemerintah Brasil telah berinvestasi dari PDB-nya dalam program ini dan berhasil mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin di Brasil (Rasella dkk, 2013) Program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan evaluasi program, sehingga program ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani.

c. Program National Rural Employment Guarantee di India Program National Rural Employment Guarantee (NREGA) di India adalah program kesejahteraan sosial yang memberikan jaminan pekerjaan kepada warga miskin di daerah pedesaan. Program ini menjadi salah satu program kesejahteraan sosial terbesar di dunia. Program ini berhasil mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah pedesaan di India (Chakraborty, 2011). Partisipasi masyarakat dalam program ini sangat penting, karena program ini didasarkan pada prinsip partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program. Masyarakat dilibatkan dalam proses pemantauan melalui forum-partisipatif yang diadakan secara berkala.

Best practices atau praktik terbaik dalam partisipasi masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan melibatkan beberapa aspek. Pertama, pemerintah harus memberikan informasi yang cukup dan transparan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial yang ada dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, pemerintah dapat membangun forum-forum partisipasi masyarakat, seperti kelompok kerja, kelompok advokasi, dan kelompok pemantauan. Dalam forum ini,

masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai program-program kesejahteraan sosial yang ada dan bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan.

Ketiga, pemerintah dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program kesejahteraan sosial. Masyarakat dapat membantu dalam merencanakan program, mengawasi pelaksanaan program, dan memberikan masukan dalam evaluasi program.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa; Partisipasi masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Tantangan dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat, perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan. Selain itu, pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan membangun sistem pengawasan yang efektif. Di sisi lain, masyarakat juga perlu aktif mengambil peran dan memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

- Aguado, A. (2021). Implementation of Pantawid Familyyang Pilipino Program (4ps) in Barangay Talumpok, Batangas City. *International Journal of Research Studies in Education*, Vol.10, Issue7. DOI:10.5861/ijrse.2021.21603.
- Anasiru, R. (2011). Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Otoritas; Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, (No.1), pp.60-64. DOI: 10.26618/ojip.v1i1.19.
- Astawa, I Nyoman T. (2017). Memahami Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Kemajuan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, Vol.3, (No.2), pp.197-205. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.200>
- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, (No.1), pp.128–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Asyhabuddin. (2022). Welfare Society Dalam Sistem Kesejahteraan Sosial Di Indonesia. *ICODEV: Indonesian Community Developmnet Journal*, Vol.3, (No.1), pp.31-39. <https://doi.org/10.24090/icodev.v3i1.6232>
- BEKEN, Hikmet Gülçin. (2021). Gıda Güvencesi Bağlamında Gıda Bankacılığı: İngiltere ve Kanada Ülke Örnekleri. *Fiscaoeconomia*, Vol.5, Issue1, pp.153-176. DOI:10.25295/fsecon.833354.
- Chakraborty, P. (2011). Implementation of the National Rural Employment Guarantee Act in India: Spatial Dimensions and Fiscal Implications. *SSRN Electronic Journal*. DOI: 10.2139/ssrn.1000215.
- Czapanskiy, Karen Syma., & Manjoo, Rashida. (2008). The Right of Public Participation in the Law-Making Process and the Role of Legislature in the Promotion of This Right. *Duke Journal of Comparative & International Law*, Vol.19, (No.1), pp.1-40. <https://scholarship.law.duke.edu/djCIL/vol19/iss1/1>
- Dahlan, Ahmad., & 'Irfaan, Santosa. (2014). Mengagas Negara Kesejahteraan. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.2, (No.1), pp.1-22. DOI: 10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22.
- Miller, Dorothy C. (1991). Women and Social Welfare: A Feminist Analysis. *American Journal of Sociology*, Vol.96, (No.5). <https://doi.org/10.1086/229665>
- Elviandri., Dimiyati, Khuzdaifah., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, Vol.31, (No.2), pp.252-266. <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Fedryansyah, M. (2016). Kebijakan Sosial Dalam Pembangunan. *Share; Social Work Journal*, Vol.6, (No.1), pp.136-147. DOI:10.24198/share.v6i1.13159.
- Feenstra, Ramón A. (2015). Activist and Citizen

- Political Repertoire in Spain: A Reflection Based on Civil Society Theory and Different Logics of Political Participation. *Journal of Civil Society*, Vol.11, (Issue 3).  
DOI: 10.1080/17448689.2015.1060662.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tantangannya . *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol.1,(No.1).pp.23-33.  
DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2672
- Hajighasemi, Ali., Oghazi, Pejvak., Aliyari, Shahla., & Pashkevich, Natallia. (2022). The Impact of Welfare State Systems on Innovation Performance and Competitiveness: European Country Clusters. *Journal of Innovation and Knowledge*, Vol.7, (Issue 4).  
DOI: 10.1016/j.jik.2022.100236.
- Lismanto., & Utaman, Yos Johan. (2020). Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.3),pp.416-433.  
DOI:10.14710/jphi.v2i3.416-433.
- Masango, R. (2002). Public Participation: A Critical Ingredient of Good Governance. *Politeia: Journal for Political Science and Public Administration*, Vol.21, (No.2), pp.52-65.<https://journals.co.za/doi/10.10520/EJC88060>
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, Nancy. (2014). "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi ; Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.5, (No.2), pp.157-164.<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i2.457>
- Nasrah, Hidayati., Irdayanti., Nesneri, Yessi., & Hidayati, Fitri. (2021). Implementasi Program Jaring Pengaman Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pekanbaru. *Jurnal El-Riyasah*, Vol.11, (No.2),pp.119-138. DOI: 10.24014/jel.v11i2.11699.
- Nurbaiti, Siti Robiah., & Bambang, Azis Nur. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). *Proceeding Biology Education Conference*, Vol.14,(No.1),pp.224-228.  
<https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/18940>
- Harris, Sarah Parker., Owen, Randall., & Gould, Robert. (2012). Parity of Participation in Liberal Welfare States: Human Rights, Neoliberalism, Disability and Employment. *Disability and Society*, Vol.26, (Issue 6),pp.823-836.DOI:10.1080/09687599.2012.679022.
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan Dan Perannya Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women And Its Role On Social Welfare Development). *Jurnal Natapraja: Kajian Ilmu Administrasi Negara*, Vol.3, (No.1). DOI:10.21831/jnp.v3i1.11957.

- Rahul, Patley., Chander, K. Rakesh., Murugesan, Manisha., Anjappa, Adarsha Alur., Parthasarathy, Rajani., Manjunatha, Narayana, Kumar, Channaveerachari Naveen., & Math, Suresh Bada. (2021). Accredited Social Health Activist (ASHA) and Her Role in District Mental Health Program: Learnings from the COVID 19 Pandemic. *Community Mental Health Journal*, Vol.57, (No.3), pp.442-445. DOI: 10.1007/s10597-021-00773-1.
- Rasella, Davide., Aquino, Rosana., Santos, Carlos A. T., Paes-Sousa, Rômulo., & Barreto, Mauricio L. (2013). Effect of a Conditional Cash Transfer Programme on Childhood Mortality: A Nationwide Analysis of Brazilian Municipalities. *The Lancet*, Vol.382, pp.57-64. DOI:10.1016/S0140-6736(13)60715-1.
- Sahoo, S. (2008). Globalization, Social Welfare and Civil Society in India. *Journal of Comparative Social Welfare*, Vol.24, Issue 2, pp.133-141. DOI:10.1080/17486830802231073.
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa; Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol.18, (No.2), pp.105-116. DOI:10.33007/inf.v18i2.73.
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol.6, (No.2), pp.98-102 DOI:10.31334/trans.v6i2.33.
- Ta'dung, Yohanis Lotong., & Lusdani, Westerini. (2020). Akuntabilitas Sosial Dana Desa : Peran Dan Partisipasi Masyarakat. *JESIT: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Terapan*, Vol.1, (No.1), pp.25-36. <https://journals.ukitoraja.ac.id/index.php/jesit/article/view/1078>
- Widayanti, Sri Yuni M. (2016). Sikap Sosial Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam Banjir. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol.15, (No.2), pp.145-163. <https://doi.org/10.31105/jpks.v15i2.1353>
- Yay, Gülsün Gürkan., & Aksoy, Tolga. (2018). Globalization and the Welfare State. *Quality and Quantity*, Vol.52, pp.1015-1040. DOI:10.1007/s11135-017-0501-z.

#### CONFERENCE

- Van Deth, Jan W. (2001). Studying Political Participation: Towards a Theory of Everything?. In Conference: Joint Sessions of Workshop *European Consortium for Political Research* (pp.1-19). Grenoble: New ICT's.

#### TESIS

- Sari, Yayang S. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pariwisata Di Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran*. UIN Raden Intan Lampung

## **BUKU**

Sukmana, Oman., Kurniawan, Luthfi J.,  
Abdussalam., & Masduki. (2015). *Negara  
Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial:  
Perspektif Kebijakan Sosial Yang  
Memberikan Jaminan Perlindungan Warga  
Negara*. Malang: Setara Press